



► HAK ANAK

Lingkungan Sekolah Harus Bebas Bullying

Sunartono & Lajeng Padmaratri
redaksi@harianjogja.com

JOGJA—Kasus perundungan atau *bullying* yang terjadi di sekolah sering kali tidak terungkap dan tidak pernah dilaporkan.

Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli setiap tahun, mestinya menaruh perhatian khusus pada hak anak agar bebas dari perundungan, terutama di lingkungan sekolah.

Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kota Jogja, Sylvi Dewajani, memperkirakan kasus perundungan pada anak sebenarnya cukup banyak. Sayangnya, kasus tidak dilaporkan sehingga jarang

muncul ke permukaan. Kasus ini ada beragam jenis, mulai dari antarsiswa, dari guru ke siswa, dari sekolah ke siswa, dan bentuk lain dengan objek siswa sebagai korban.

Sylvi mengatakan perundungan semestinya dilaporkan ke pihak terkait sehingga bisa dilakukan tindak lanjut agar tidak berkepanjangan.

“Banyak tetapi tidak terlapor [dilaporkan], karena yang dilaporkan biasanya yang kekerasan. Seharusnya memang semuanya terlapor,” katanya Minggu (24/7).

Kasus terakhir perundungan yang menyedot perhatian terjadi di Tasikmalaya.

Lingkungan Sekolah...

Bahkan, korban perundungan sampai meninggal dunia akibat depresi.

Ia mengatakan masa awal tahun ajaran baru seperti pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di setiap sekolah bisa menjadi momentum tepat dalam menanamkan kepada siswa baru tidak melakukan perundungan kepada temannya. Tak hanya itu di awal tersebut orang tua diminta agar selalu menekankan pada anak agar tidak merundung. Terkait dengan pencegahan perundungan ini telah ada Permendikbud No.82/2015 sebagai rambu untuk penanganan perundungan atau berbagai praktik kekerasan yang muncul. "Untuk kasus *bullying* ini memang perlu promosi kesadaran di sekolah, baik pada guru, siswa dan komite sekolah," ujarnya.

Berdasarkan data yang dirilis Programme for International Student Assessment (PISA) 2018, Indonesia termasuk urutan kelima negara dengan persentase terbesar siswa mengalami perundungan di angka 41,1%. Adapun persentase lokasi terjadinya perundungan terjadi di sekolah. PISA adalah program penilaian pelajar internasional yang berupa studi penilaian tingkat internasional yang diselenggarakan OECD untuk mengevaluasi sistem pendidikan di dunia dengan mengukur performa akademik pelajar sekolah berusia 15 tahun pada bidang matematika, sains, dan kemampuan membaca.

Menurut Sylvi di Jogja seharusnya semua sekolah bebas perundungan dan menerapkan sistem antiperundungan. Karena sebagian besar sudah mendeklarasikan sebagai sekolah ramah anak (SRA). Salah satu prinsip SRA adalah bebas dari tindakan perundungan. "Kalau sekolah ramah anak harusnya sudah tidak ada *bullying*. Karena sekolah ini memiliki karakteristik warga sekolah anti terhadap segala bentuk kekerasan termasuk verbal dan anak belajar dengan aman, nyaman serta diperlakukan adil."

Kepala Disdikpora DIY Didik Wardaya mengatakan dinas telah melakukan berbagai upaya bersama sekolah untuk mencegah adanya perundungan. Terutama memberikan pemahaman kepada seluruh sekolah baik guru, siswa, dan tenaga kependidikan agar selalu mengajarkan kebinekaan untuk mencegah perundungan. "Prinsipnya semua sekolah harus mengajarkan itu saling menghargai, memahami tanpa *bully*, kultur itu harus selalu ditumbuhkan agar semua nyaman," katanya.

Ia menambahkan jawabannya telah mendorong dan memfasilitasi terbentuknya SRA, sekolah menyenangkan dan sekolah inklusi. Melalui program itu harapannya dapat mencegah terjadinya perundungan. "SRA, sekolah menyenangkan dan SPPI [sekolah penyelenggara pendidikan inklusi] semua ada di DIY. Tetapi harapan kami tanpa ada label SRA dan sejenisnya itu semua sekolah harus tetap anti-*bullying*," katanya.

Fenomena Gunung Es

Kasus perundungan terhadap anak yang baru-baru ini terjadi seolah menjadi ironi pada momen Hari Anak Nasional kemarin. Dosen psikologi Universitas Gadjah Mada (UGM), Novi Poespita Candra, menyebut kejadian ini sangat banyak terjadi di usia anak-anak dan lingkungan pendidikan. Hanya, belum banyak yang dilaporkan sehingga menjadi fenomena gunung es.

Menurutnya, perundungan disebabkan berbagai faktor, beberapa di antaranya dari faktor personal dan lingkungan. "Soal faktor lingkungan, saya melihat secara luas bahwa sistem pendidikan kita tidak menciptakan ruang-ruang lingkungan yang berempati, menghargai, dan sebagainya. Jadi ini akan jadi peristiwa terus-menerus kalau arah pendidikannya tidak berubah."

Ia mengungkapkan saat ini pendidikan di Indonesia masih mengarah ke kurikulum yang berfokus pada sisi akademik.

Padahal seharusnya pendidikan membangun *well-being* atau kesejahteraan psikologis anak.

"*Well being* itu kondisi seorang anak sehat jiwa dan sehat fisik. Ini belum jadi narasi [dalam dunia pendidikan]. Makanya *bullying* itu tidak dilihat sebagai hasil dari sistem pendidikan yang salah. *Bullying* seolah-olah sebuah hal yang terpisah dari pendidikan," ujar penggagas Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM) ini.

Akibat pendidikan masih berfokus pada materi atau konten akademik, lanjut Novi, sekolah tidak akan menciptakan lingkungan yang positif dan etis. Menurutnya, anak perlu dididik sejak kecil untuk menciptakan lingkungan yang saling menghargai dan berempati. "Soal faktor personal tadi, sekolah seharusnya melatih anak membangun ruang kesadaran diri. Misal, anak diajak berefleksi, kenapa kita harus menghargai teman, kenapa kita enggak boleh mengejek teman, itu semua didiskusikan agar mereka sadar kenapa mereka harus berperilaku positif."

Selama ini, kata Novi, diskusi semacam itu masih minim dan terbatas. Ketika ada anak yang mengejek temannya, tiba-tiba saja orang dewasa menasihati dan menghukum, alih-alih membangun kesadaran dirinya. Jika terus terjadi, hal ini akan menjadi problem yang terus terjadi.

Pola Pikir

Sistem pendidikan sebenarnya bisa diubah agar bisa menekan kasus perundungan terhadap anak. Menurut Novi, hal itu bisa dicapai dengan membangun kesadaran diri, menciptakan lingkungan positif-etis, membangun penalaran dan keterhubungan. Kemudian, sekolah perlu membangun lingkungan yang positif dan etis. Selain itu, pembelajaran harus berbasis penalaran, tidak hanya hapalan materi. Tak kalah penting aspek keterhubungan merupakan upaya menghubungkan sekolah dengan berbagai komunitas, seperti komunitas orang tua dan masyarakat.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan			

Yogyakarta, 24 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005